

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT T.A. 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya dapat terselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh deputi bidang pemberdayaan masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat ini. Hal ini merupakan suatu persyaratan dalam penyusunan mekanisme, program, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan di masa depan yang menjadi semakin dinamis dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta daam dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK), maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (LKjIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. Heri Maryadi, M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGA	ANTARi
DAFTAR ISI .	iii
RINGKASAN	EKSEKUTIFiv
BAB I	PENDAHULUAN1
	A. GAMBARAN UMUM1
	B. DASAR HUKUM3
	C. TUPOKSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASIŬ 4
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA6
	A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA 6
	B. RENCANA KINERJA TAHUNAN8
	C. PERJANJIAN KINERJA10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA11
	A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA11
	B. AKUNTABILITAS KEUANGAN26
	C. KINERJA ANGGARAN27
BAB IV	PENUTUP
	A. KESIMPULAN28
	B. REKOMENDASI28
LAMPIRAN ǔ	й й й й й й й й й й й й й й й й й й й
DOKUMEN P	ENGUKURAN KINERJA Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Ů Å

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah ditetapkan dan sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 yaitu *Meningkatnya Ketanggapsiagaan Masyarakat Terhadap Ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*.

Peningkatan ketanggapsiagaan tersebut didasarkan pada Indikator Kinerja Program y a i t u J u ml a h K a b u p a t e n / K o t a Ancaman Narkoba dengan target sejumlah 120 kabupaten/kota di tahun 2023 yang diukur melalui pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN).

berl

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisa- si	%	Keterangan
Meningkatnya	Jumlah	120	122	101,67	- 23 Kab/Kota
ketanggap-	Kabupaten/		kabupaten		berkategori
siagaan	Kota	/kota	/kota		Sangat
masyarakat	berkategori				Tanggap
terhadap	Tanggap				- 99 Kab/Kota
ancaman	Ancaman				berkategori Tanggap
penyalahguna-	Narkoba				. a99ap
an dan					
peredaran gelap					
narkoba					

Sebagaimana ditunjukan dalam table di atas, terlihat bahwa realisasi dari Sasaran Program Kedeputian Dayamas TA 2023, dari target 120 Kabupaten/kota tanggap terealisasi sebanyak 122 Kabupaten/Kota tanggap atau 101,67%. Peningkatan target ini tidak terlepas dari kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Alternatif.

Dari capaian kabupaten/kota tanggap tercatat bahwa dari 173 Kabupaten/ Kota yang terdapat BNNK, terdapat 23 kabupaten/kota yang dalam kategori sangat tanggap dan 99 kabupaten/kota yang tanggap. Sementara 51 kabupaten/kota masuk dalam kategori cukup tanggap. Sementara dalam penilaian Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Ikotan) TA 2023 mencapai nilai skala 2,84 dalam kategori Tanggap. Namun dibanding TA 2022 dengan capaian skala Ikotan 3,27 maka terjadi penurunan 0,43 Poin tetapi masih dalam kategori Tanggap dengan pencapaian B.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target hingga 101,67% disebabkan, *pertama*, perhitungan dari peran serta penggiat P4GN yang berhasil membuat kemandirian P4GN di lingkungan, yang secara total TA 2023 ini memberikan skala Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional (IKP) sebesar 3,5 atau mandiri. Jika dibanding capaian IKP TA 2022 yang sebesar 3,49 maka terjadi peningkatan IKP nasional sebesar 0,01.

Angka ini disumbang dari IKP dari 414 lembaga (100%) yang terdiri dari: IKP lembaga Pemerintah (skala 3,49 atau Sangat Mandiri), IKP Lembaga swasta (skala 3,50 atau Sangat Mandiri), IKP Lembaga masyarakat (skala 3,49 atau Sangat Mandiri) dan Lembaga Pendidikan (skala 3,51 atau Sangat Mandiri).

Kedua, Faktor keberhasilan mengubah kawasan rawan didukung dengan capaian keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba, pada tahun 2021 capaian keberhasilan sejumlah 60 kawasan dari target sebesar 57 kawasan pada tahun 2022 capaian keberhasilan sejumlah 76 kawasan dari target 70 kawasan sedangkan pada tahun 2023 yang berjumlah 68 kawasan dari target 52 kawasan.

Keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba yang berjumlah 68 kawasan secara keseluruhan berhasil mengubah data jumlah Kawasan rawan narkoba tahun 2022, yang semula berjumlah 8.002 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada menjadi 7.426 di Tahun 2023 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada.

Realisasi capaian Bidang Peran Serta Masyarakat tahun 2023 sebesar 99,21%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 98,60 %, terjadi kenaikan sebesar 0,61% meskipun masih dalam capaian yang sifatnya over prestasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 99,43% dan terjadi penurunan sebesar 0,22%.

Secara keseluruhan realisasi capaian Bidang Pemberdayaan Alternatif tahun 2023 sebesar 96,24%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 97,11 %, terjadi penurunan sebesar 0,87% meskipun masih dalam capaian yang sifatnya over prestasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 97,50% dan terjadi penurunan sebesar 1,26%.

Capaian dari target selama 3 tahun (2021-2023) dapat dijelaskan sebagai berikut: capaian dari target untuk tahun 2021 adalah sebesar 105 % dan ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 108 % sedangkan untuk tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 130 %.

Sementara capaian kinerja anggaran tahun 2023 diserap sebesar Rp 61.977.485.000,- atau sebesar 98,52%. Jika dibanding dengan T.A 2022 telah diserap sebesar Rp 58.977.426.966,- atau sebesar 99,07% maka terjadi penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 0,55%. Penurunan Persentase realisasi penggunaan Anggaran ini disebabkan oleh terlaksananya kegiatan dengan baik pada mata anggaran yang sebelumnya dilakukan pemblokiran *automatic adjustment*.

BABI

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Laporan Narkotika Dunia tahun 2023 (World drugs report, UNODC, Juni 2023) disebutkan bahwa, sekitar 296 juta orang di seluruh dunia (usia 15-69 tahun) menyalahgunakan narkoba dengan angka prevalensi sebesar 5,8% angka berarti meningkat 23% sejak tahun 2013. Sementara itu berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika Desember 2023, angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari yang semula 1,73% atau terdapat 173 penyalahgunaan Narkotika dari 10.000 penduduk. Jika diestimasikan jumlah pecandu setahun terakhir tersebut sebesar 3,3 juta jiwa dengan angka kematian pecandu Narkoba sebesar 30 orang per tahun.

Dari hasil Survey Nasional tersebut, diketahui pula bahwa terjadi angka penurunan angka prevalensi pecandu setahun terakhir di wilayah perdesaan sebesar 0,41 poin dan di wilayah perkotaan turun sebesar 0,13 poin. Artinya, kesadaran masyarakat perkotaan dan perdesaan akan bahaya narkoba mampu menghambat laju angka penyalahgunaan dana peredaran gelap narkoba. Namun demikian keberdayaan masyarakat anti narkoba harus terus ditingkatkan peran serta aktifnya melalui berbagai upaya meningkatkan partisipasi kemandirian dalam P4GN, sebagaimana yang diimplementasikan dalam Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN tahun 2020-2024 dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah di tingkat kabupaten/Kota.

Beberapa implementasi dalam pelaksanaan Inpres tersebut, telah banyak dilakukan oleh Pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten/Kota, seperti: penyusunan Regulasi, Pembentukan Tim Terpadu, Pembentukan Satuan Tugas dan Pelaksanaan program P4GN, termasuk deteksi dini dengan tes urin dan intervensi program P4GN di Kawasan rawan Narkoba. Dari keempat program tersebut, selaras dengan implementasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, dimana makin tinggi ketanggapsiagaan

kabupaten/kota maka akan semakin tinggi capaian pelaksaaannya Inpresnya. Oleh karena dalam rangka mempertajam keselarasan dan akselerasi antara Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tersebut perlu disusun Laporan Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menanggulangi bahaya Narkoba, sebagaimana diketahui bersama bahwa tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk bergerak secara mandiri dan berkelanjutan melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karenanya, tugas dan fungsi Bidang Dayamas yang diemban merupakan inti dari P4GN dan garda terdepan bangsa dalam memacu peran serta aktif masyarakat dalam P4GN.

Sebagai pengemban amanah memberdayakan masyarakat anti narkoba, Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberikan tugas meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Tugas ini dibagi kepada Direktorat Peran Serta Masyarakat untuk membentengi lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan kepada Direktorat Pemberdayaan Alternatif untuk melakukan intervensi P4GN pada kawasan rawan dan rentan narkoba.

Berkaitan hal-hal di atas, sebagai upaya membangun kinerja positif yang telah melaksanakan tugas yang diembannya yaitu menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disampaikan dalam bentuk capaian kinerja selama tahun 2023 yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2020 2024:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan
- 10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

- 1. Tugas Pokok dan Fungsi
 - a. Tugas Pokok

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur
 P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- 6) Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BABII

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Visi Badan Narkotika Nasional sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: ` Me v yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong _ . Se me n t a r a i t u-2,024 m erumpalka.napenjaloma.ira is niisi BNN `Penegakan Sistem H Presiden khususnya pada misi ke-6 y a k n i Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya_, perwujudan salah satu janji Presiden yakni Psikotropika Melindungi Generasi dan Untuk

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan 2020-2024, BNN pada periode sehingga diharapkan pemberantasan peredaran gelap narkotika secara professional dan pelaksanaan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif pencegahan serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang dikelola Kedeputian pemberdayaan Masyarakat BNN di Tahun 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat BNN pada tahun 2023, Untuk kemudian diharapkan mendapat

masukan dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat;

c. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-langkah strategis Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat yang akan datang.

2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitive advantages) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (competitive disadvantages), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki rencana strategis yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba". Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu kota/kabupaten dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancangan bagi para pemangku kepentingan di Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha,

maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigasi di wilayah Kab/Kota.

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Indikator Kinerja Utama tersebut diturunkan secara berjenjang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan pada 2 (dua) Direktorat.

Rencana strategis pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat terhadap P4GN dengan indikator indeks kemandirian partisipasi. Rencana strategis pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status eKeterpulihan Kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (2023)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Penetapan Kinerja yang dibuat setiap tahun oleh satuan kerja suatu Lembaga. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan kinerja pada Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja yaitu jumlah kabupaten/kota b e r k a t e g o r i `t a n g g a p a n c a ma n target Tahun 2023 yaitu sejumlah 120 Kab/Kota.

n a

Tabel 2.1. Target Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota berkategori `tanggap narkoba_	120 Kab/Kota

Adapun Penetapan Kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN. Target Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 yaitu 3,25 berkategori Mandiri.

Tabel 2.2. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks (kategori Mandiri)

Penetapan Kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja status keterpulihan kawasan rawan narkoba dari bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman yang memiliki target tahun 2023 yaitu sejumlah 52 kawasan.

Tabel 2.3. Target Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status keterpulihan kawasan rawan narkoba dari bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/ aman	52 Kawasan

C. PERJANJIAN KINERJA DAYAMAS TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2023 memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya Ketanggapsiagaan Masyarakat terhadap Ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba dan dengan target kinerja sejumlah 120 Kabupatan/Kota.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota berkategori ancaman nark	120 Kabupaten /Kota

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat T.A. 2023 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, dengan indikator kinerja berupa Indeks Kemandirian Partisipasi, dan dengan target kinerja sebesar 3,25.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A. 2023 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja berupa Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya menjadi Waspada dan dengan target kinerja sejumlah 52 kawasan.

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status keterpulihan kawasan rawan dari `Bahaya_ me n `Waspada_	52 Kawasan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

1. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

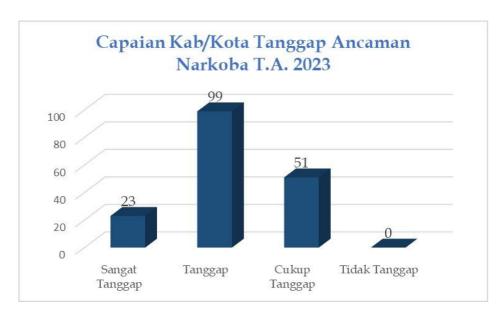
a. Capaian KOTAN

Pada pengukuran Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Ikotan) Tahun 2023 menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah berhasil melampaui target Perjanjian Kinerja Eselon I, dari target 120 Kabupaten/kota berkategori tanggap berhasil melakukan 122 Kabupaten/Kota berkategori Tanggap dengan prosentase capaian kinerja sebanyak 101,67%, sebagaimana ditunjukkan dalam table 3.1 berikut ini.

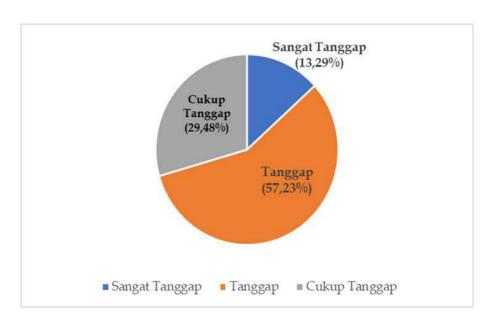
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisa si	%	Keterangan
Meningkatnya	Jumlah	120	122	101,67	23
ketanggap	Kabupaten/	Kab	Kab /		Kab/Kota
siagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahguna- an dan peredaran gelap narkoba	Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba	/ Kota	Kota		Sangat Tanggap dan 99 Kab/Kota Tanggap

Dari perhitungan Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba didapatkan hasil, yaitu sejumlah 23 wilayah Kab/Kota berstatus Tanggappgwilayah Kab/Kota berst.atus `Tanggap_

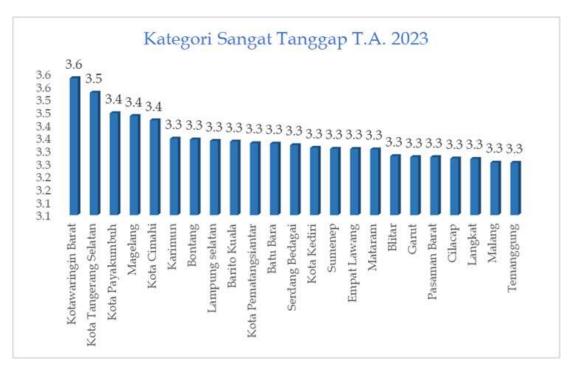


Grafik 3.1. Capaian KOTAN Tahun 2023



Grafik 3.2. Rincian Capaian KOTAN Tahun 2023

Rincian Capaian Indeks kab/kota Tanggap Ancaman Narkoba menunjukkan jumlah kab/kota Tanggap Ancaman Narkoba dari 173 kab/kota sebesar 122 kab/kota (101,67%) yang terdiri dari 23 kab/kota berkategori sangat tanggap (13,29%) dan 99 kab/kota kategori tanggap (57,23%) yang ditunjukkan pada diagram pie di atas.



Grafik 3.3. Rincian Kab/Kota Sangat Tanggap Ancaman Narkoba
Tahun 2023



Grafik 3.4. Rincian Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
Tahun 2023

Wilayah kabupaten/kota kategori sangat tanggap sejumlah 23 kab/kota dengan nilai indeks sebagai berikut : Kota Waringin Barat (3,6), Kota Tangerang Selatan (3,5), Kota Payakumbuh (3,4), Magelang (3,4), Kota Cimahi (3,4), Karimun (3,3), Bontang (3,3), Lampung Selatan (3,3), Barito

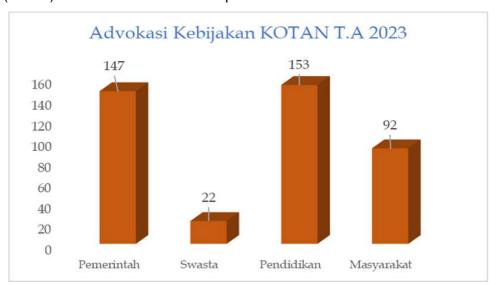
Kuala (3,3), Kota Pematangsiantar (3,3), Batu Bara (3,3), Serdang Bedagai (3,3), Kota Kediri (3,3), Sumenep (3,3), Empat Lawang (3,3), Mataram (3,3), Blitar (3,3), Garut (3,3), Pasaman Barat (3,3), Cilacap (3,3), Langkat, (3,3), Kab. Malang (3,3), dan Temanggung (3,3).

Wilayah kabupaten/kota kategori tanggap sejumlah 99 kab/kota dengan nilai indeks 15 kab/kota tertinggi sebagai berikut :

Kota Batam (3,25), Trenggalek (3,25), Hulu Sungai Utara (3,24), Nganjuk (3,24), Batang (3,24), Banyumas (3,23), Gorontalo Utara (3,23), Kota Dumai (3,23), Kota Tegal (3,23), Kalimantan Tengah (3,22), Pasuruan (3,21), Kota Tangerang (3,20), Kep. Riau (3,19), LabuhanBatu Utara (3,18), Kota Tanjung Balai (3,17), dan Kota Depok (3,17).

b. Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN

Pada pengukuran Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) Tahun 2023 dihasilkan pada Grafik berikut:



Grafik 3.5. Capaian Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2023

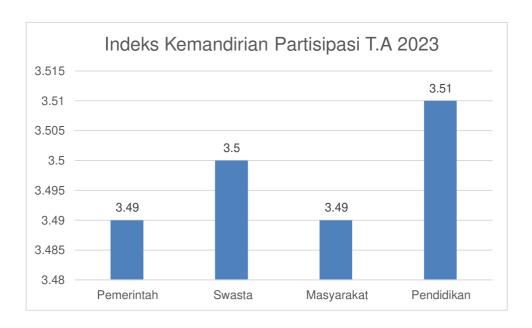
Capaian Advokasi kebijakan KOTAN tahun 2023 sebanyak 414 lembaga (100%) dari target yang ditetapkan 414 lembaga yang tersebar di 4 lingkungan dengan rincian 147 lembaga di lingkungan pemerintah, 22 lembagadi lingkungan swasta, 153 lembaga di lingkungan Pendidikan dan 92 lembaga di lingkungan masyarakat.

Direktorat Peran Serta Masyarakat

Pada pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2023 dengan capaian tertinggi secara berurutan lingkungan pendidikan (3,51), lingkungan masyarakat (3,49), lingkungan pemerintah (3,49), dan lingkungan swasta (3,50).

Tabel. 3.2. Capaian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat TA 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks (kategori Mandiri)	3,5 Indeks (kategori sangat Mandiri)	107,69



Grafik 3.6. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) T.A. 2023

Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 dengan capaian tertinggi secara berurutan lingkungan pendidikan (3,51), lingkungan masyarakat (3,49), lingkungan pemerintah (3,49), dan lingkungan swasta (3,50). Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi kategori sangat mandiri, telah memaksimalkan potensi kewilayahan dengan terbentuknya sistem (regulasi) yang mengikat, a d a n y a t o k o h (p e n g g i a t) s e b a g a i `a g e n t masyarakat di lingkungannya secara mandiri, sarana dan prasarana sebagai

pendukung kegiatan, metode dan ketersediaan anggaran baik bersumber dari APBD maupun swadaya.

Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Pengukuran Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan Narkoba (IKKR) tahun 2023, dengan target kawasan rawan yang pulih telah ditetapkan berjumlah 52 kawasan dan berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 didapatkan bahwa realisasi jumlah kawasan yang pulih sebanyak 68 kawasan yang pulih.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2023

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Pencegahan dan Pemberanta- san Penyalahgun aan dan Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/ Aman	52 kawasan	68 kawasan	130,76



Grafik 3.7. Target dan Capaian Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba T.A. 2023

Status keterpulihan kawasan rawan narkoba merupakan hasil pengukuran keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba. Suatu kawasan dikatakan pulih

bila kawasan tersebut sehat kembali setelah dilakukan intervensi program pemulihan. Intervensi program pemulihan tersebut melalui program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) mulai dari Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan dan Kerja Sama.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kawasan rawan yang mengalami keterpulihan berdasarkan target sebanyak 52 kawasan dan telah pulih berjumlah 68 kawasan atau 130,76%. Kondisi ini disebabkan oleh penambahan kegiatan bimtek *life skill* yang dilaksanakan melalui sinergi Kegiatan K/L, Dana Hibah Pemerintah Daerah serta CSR Dunia Usaha. Status awal kawasan yang diintervensi dengan status Bahaya berjumlah 36 desa/kelurahan dan status waspada berjumlah 36 desa/kelurahan. Dari 72 desa/kelurahan yang diintervensi terdapat 1 kawasan Bahaya dan 3 kawasan waspada yang tidak mengalami keterpulihan hal ini disebabkan karena kawasan tersebut mulai diintervensi pada tahun 2023, selebihnya berubah menjadi waspada sebanyak 19 kawasan, siaga 44 kawasan dan aman 5 kawasan.

2. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Tahun 2021-2023) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Capaian KOTAN 3 Tahun

Pada analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Program Deputi Bldang Pemberdayaan Masyarakat pada 3 tahun terakhir (2021, 2022 dan 2023) tercatat capaian sebagai berikut:



Grafik 3.8. Capaian Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2021-2023

Capaian jumlah kabupaten/kota dari tahun 2021-2023 dengan kategori sangat tanggap tahun 2022-2023 mengalami peningkatan 9,5% dan untuk kategori tanggap di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan 33%, di tahun 2022-2023 mengalami penurunan 23,3%. Capaian jumlah kabupaten/kota dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2021-2023) mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Namun secara periodik jika dibandingkan dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan (18,67%).

Advokasi Kebijakan KOTAN T.A 2021-2023 250 218 208 203 199 200 144 132 153 150 79 / 92 100 - 59 50 0 Pemerintah Swasta Pendidikan Masyarakat ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

b. Capaian Kebijakan Advokasi KOTAN 3 Tahun

Grafik 3.9. Capaian Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2021-2023

Capaian advokasi kebijakan KOTAN di lingkungan pemerintah sebanyak 218 lembaga (2021), 144 lembaga (2022) dan 147 (2023), menunjukkan bahwa tahun 2021-2022 mengalami penurunan capaian jumlah lembaga sebesar 33,9% namun di tahun 2023 peningkatan 2,1%.

Capaian advokasi kebijakan KOTAN di lingkungan swasta sebanyak 199 lembaga (2021), 59 lembaga (2022), dan 22 lembaga (2023), menunjukkan tahun 2021-2023 terjadi penurunan capaian jumlah lembaga yang sangat signifikan di tahun 2021-2022 sebesar 70,4% sedangkan di tahun 2022-2023 sebesar 62,7%

Capaian advokasi kebijakan KOTAN di lingkungan Pendidikan sebanyak 208 lembaga (2021), 132 lembaga (2022), dan 153 lembaga (2023), tahun 2021-

2023 mengalami dinamika fluktuatif terlihat pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan capaian jumlah lembaga sebesar 36,5% dan di tahun 2022-2023 terjadi peningkatan capaian jumlah lembaga sebesar 15,9%.

Capaian advokasi kebijakan KOTAN di lingkungan masyarakat sebanyak 203 lembaga (2021), 79 lembaga (2022), dan 92 lembaga (2023). Pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan sebesar 61,08% dan di tahun 2022-2023 terjadi peningkatan 16,5%.

Direktorat Peran Serta Masyarakat

Pada analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat pada 3 tahun terakhir (2021,2022 dan 2023) tercatat capaian sebagai berikut:



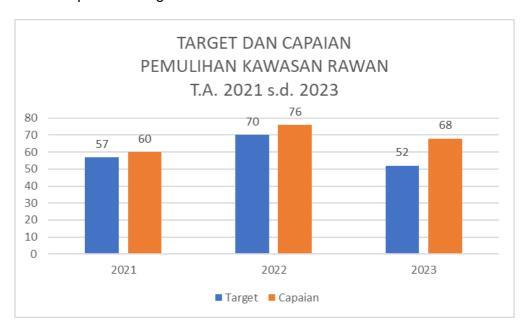
Grafik 3.10. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)
Tahun 2021-2023

Capaian IKP dalam 3 tahun terakhir 2021-2023 sangat fluktuatif di mana lingkungan Pemerintah tahun 2021-2022 mengalami peningkatan 6,5% dan di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan 0,5%. Lingkungan Swasta di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar yang cukup drastis sebesar 11,25% dan di tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 1,25%. Untuk lingkungan Pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021-2022 yaitu sebesar 12,75% dan tahun 2022-2023

mengalami penurunan sebesar 3,5%. Sedangkan pada Lingkungan Masyarakat tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar 5% dan di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 2,5%.

Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Pada analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Alternatif pada 3 tahun terakhir (2021,2022 dan 2023) tercatat capaian sebagai berikut:



Grafik 3.11. Target dan Capaian Pemulihan Kawasan Rawan Narkoba
Tahun 2021-2023

Capaian dari target selama 3 tahun (2021-2023) dapat dijelaskan sebagai berikut: capaian dari target untuk tahun 2021 adalah sebesar 105 % dan ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 108 % sedangkan untuk tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 130 %. Kebijakan alokasi anggaran yang fluktuatif menyebabkan target kinerja yang tidak bisa meningkat setiap tahun namun dengan sinergi stakeholder baik K/L, Pemda maupun Dunia Usaha mampu meningkatkan capaian kinerja selama 3 tahun.

3. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja);

Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian Indeks KOTAN (Ikotan) 2023 di level Nasional adalah 2,84 masuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B.

Direktorat Peran Serta Masyarakat

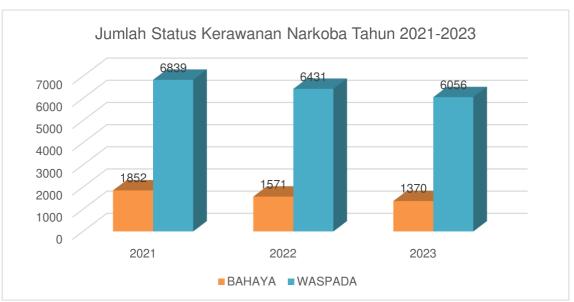
Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional Tahun 2023 adalah 3,5 dengan kategori Sangat Mandiri (A), sedangkan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan sebesar 9,7% di tahun 2021-2022 dan di tahun 2022-2023 sebesar 0,2%.



Grafik 3.12. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional (IKP Nasional) Tahun 2021-2023

Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Capaian keterpulihan kawasan rawan narkoba di tingkat Nasional pada Tahun 2023 adalah 7.426 kawasan sedangkan dalam 3 tahun terakhir (2021-2023) adalah sebagaimana tercantum dalam grafik berikut:



Grafik 3.13. Jumlah Status Kerawanan Kawasan di Tingkat Nasional Tahun 2021-2023

4. Informasi detail kinerja dan kualitas dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Adapun beberapa faktor yang mendukung suksesnya implementasi strategi kedeputian pemberdayaan masyarakat dalam mencapai target 101,67% tersebut antara lain :

- a. Peningkatan implementasi Inpres 2/2020 tentang RAN P4GN 2020-2024 yang direspon secara baik dan faktual oleh 36 K/L, 34 pemerintah provinsi dan 173 pemerintah Kabupaten/Kota, dimana 4 sasaran inpres, yaitu: regulasi, pembentukan tim terpadu, pembentukkan satgas dan alokasi program dan anggaran;
- b. Apresiasi dari jajaran Kepala BNN RI yang selalu melakukan kunjungan kerja dan audiensi secara intensif, sinergis, komunikatif dan kolaboratif mendiskuiskan pentingnya Kebijakan Kotan sebagai akselerasi war on drugs terutama dalam implementasi 4 strategi BNN RI dengan pemerintah Provinsi, Akademisi, Praktisi dan Dunia usaha di 34 provinsi;
- c. Apresiasi 147 dari 414 pemerintah kabupaten/kota atau 35,5% yang telah melakukan advokasi Lembaga dalam implementasi kebijakan Kotan yang telah melaksanakan penilaian IKP dengan skala 3,42 (kategori Baik) dengan program deteksi dini (tes urin) dan pembentukan tim terpadu P4GN;

- d. Dukungan BUMN dalam membantu program dan kegiatan pemulihan Kawasan rawan narkoba yang menjadikan branding pemebrdayaan masyarakat khususnya kegiatan pemberdayaan alternatif dikenal secara luas melalui pemberitaan media cetak dan elektronik;
- e. Dukungan dunia usaha terutama PT Ujang Jaya Internasional yang menjadi Distributor yang bersedia membeli hasil panen 396 ton kopi, pada 1.007 petani binaan program GDAD di Aceh yang telah disertifikasi oleh Starbucks, di luas lahan budidaya ± 1.500 Ha, dengan nilai omzet sebesar Rp 29.631.000.000,- sehingga menjadi pemicu faktor 7 dari 11 kota di Aceh berkategori tanggap ancaman narkoba.

Tahun 2021-2023, Wilayah Langkat, Mataram, Morowali, Barito Kuala, Malang Bontang, Lampung Selatan, dan Magelang serta dapat mempertahankan wilayahnya dalam kategori sangat tanggap yang artinya mampu menunjukkan potensi ketanggapan yang sangat baik, memahami dan menemukenali seluruh aspek dan potensi wilayahnya dan telah mengetahui cara mengantisipasi dan memitigasi ancaman dari luar. Terbentuknya Tim terpadu P4GN, adanya regulasi P4GN serta rencana aksi daerah, memperluas ruang gerak kolaborasi pentaheliks dalam implementasi kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba.

Hambatan yang saat ini dihadapi oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah masih minimnya jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang dilantik, dimana pada tahun 2023 baru sejumlah 49 personil baik di tingkat BNN Pusat maupun wilayah.

Hal ini menyebabkan dalam pelaksanaan tugas, terutama di wilayah masih belum optimal mengerjakan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat (masih melakukan pekerjaan pada fungsi Pencegahan).

Direktorat Peran Serta Masyarakat

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi kategori sangat mandiri, telah memaksimalkan potensi kewilayahan dengan terbentuknya sistem (regulasi) yang mengikat, adanya tokoh (penggiat) sebagai `agent of yanghange _ menggerakkan masyarakat di lingkungannya secara mandiri, sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan, metode dan ketersediaan anggaran

baik bersumber dari APBD maupun swadaya. Pelaksanaan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024, masih mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong peran aktif kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan P4GN.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari terlaksananya proses bisnis Direktorat Peran Serta Masyarakat melalui beberapa tahapan yang menandakan telah dilaksanakan dengan baik. Proses bisnis tersebut mulai dari pembinaan teknis kepada instansi vertikal, pemetaan program peran serta masyarakat, peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat serta monitoring evaluasi program.

Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Kegiatan pemberdayaan alternatif dalam rangka pemulihan kawasan rawan peredaran dan kultivasi tanaman narkoba dilaksanakan melalui beberapa tahapan dalam proses bisnis, meliputi:

- a. Pembinaan Teknis Pemberdayaan Alternatif
- b. Pemetaan Potensi SDM & SDA kawasan rawan narkoba
- c. Pemetaan Stakeholder Kawasan Rawan Narkoba
- d. Rapat Kerja Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif
- e. Bimbingan Teknis Stakeholder dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Alternatif
- f. Bimbingan Teknis *Life Skill* pada Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba
- g. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif

Direktorat Pemberdayaan Alternatif pada tahun anggaran 2023 memiliki target kinerja sebanyak 52 kawasan dengan status bahaya dan waspada, dan dapat dicapai sebanyak 68 kawasan. Pencapaian target kinerja tersebut sebesar 130 persen, artinya Direktorat Pemberdayaan Alternatif berhasil melebihi target yang ditentukan di awal. Kelebihan pencapaian target tersebut dikarenakan adanya dukungan dana hibah pemerintah daerah, tanggung jawab sosial lingkungan (CSR), dukungan anggaran dari kementerian/lembaga, serta optimalisasi anggaran empat BNNK. Adapun rincian kelebihan capaian tersebut:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan di 1 kawasan pada Kabupaten Bireuen;

- b. Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali di 1 kawasan;
- c. Pemerintah Provinsi Riau di 1 Kawasan;
- d. Pemerintah Kabupaten Sukabumi di 1 Kawasan;
- e. PT PLN 5 Kawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan di Provinsi Jambi, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung.
- f. Optimalisasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan alternatif oleh BNNP Gorontalo, BNNP Kalimantan Selatan, BNNK Bireuen, BNNK Gayo Lues, dan BNNK Pematang Siantar masing-masing 1 Kawasan, serta Direktorat Pemberdayaan Alternatif di 2 kawasan.

5. Informasi efisiensi atas penggunaan Sumberdaya dalam mencapai kinerja

Deputi Pemberdayaan Masyarakat saat ini masih mengupayakan pemaksimalan potensi Sumberdaya manusia melalui perekrutan Jabatan Fungsional penggerak Swadaya Masyarakat, hal ini disebabkan wilayah secara fungsi masih menggabungkan antara fungsi pencegahan dengan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ke depannya pengangkatan JF PSM akan lebih diutamakan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khusus di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Posisi saat ini JF PSM yang sudah dilantik berjumlah 49 orang di pusat maupun wilayah dan jumlah ini masih jauh dari DSP JF PSM yang tercantum dalam Keputusan Kepala BNN nomor 175 Tahun 2022.

6. Informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya

Upaya perbaikan di dan penyempurnaan kinerja di Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat saat ini dilakukan melalui memaksimalkan Kerjasama atau sinergi dengan *stakeholder* antara lain:

- a. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah tentang P4GN sebagai payung hukum implementasi Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- b. Menyusun rencana aksi daerah tentang P4GN yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan swasta melalui program CSR;
- d. Mendorong partisipasi aktif dan peran Kementerian/Lembaga melalui implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN;
- e. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam program Dayamas khususnya membangun kemitraan masyarakat antara lain PKK, Komunitas Pemuda dan komunitas masyarakat lainnya.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Plafon Anggaran

Anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat T.A 2023 sebesar Rp. 49.964.528.000,- berasal dari RO Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan Layanan Perkantoran. Sedangkan untuk anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2023 sebesar Rp. 11.930.987.000,- berasal dari RO Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang dan Juknis Pemberdayaan Alternatif serta hibah dari PLN.

2. Realisasi Anggaran

Capaian penyerapan anggaran T.A 2023 telah diserap sebesar Rp 61.895.515.000,- atau sebesar 98,64%. Jika dibanding dengan T.A 2022 telah diserap sebesar Rp 58.977.426.966,- atau sebesar 99,07% maka terjadi penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 0,43%. sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.4 berikut ini. Hal ini disebabkan anggaran mengalami kenaikan oleh tambahan dana hibah yang bersamaan dengan buka blokir/AA di bulan November 2023 sehingga terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan serta adanya alokasi anggaran tunkin yang tidak terserap dan kembali ke kas negara atau dialihkan ke satuan kerja lain.

Tabel 3.4. Kinerja Anggaran TA 2023

Kinerja Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Sisa (dalam Rp)	Capaian (%)
Direktorat PSM	49.964.528.000,-	49.573.820.035,-	390.707.965,-	99,21 %
Direktorat Dayatif	11.930.987.000	11.482.431.785,-	448.555.215,-	96,24 %
Total Dayamas	61.895.515.000,-	61.056.251.820,-	839.263.180,-	98,64 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Capaian Indeks kab/kota Tanggap Ancaman Narkoba menunjukkan jumlah kab/kota Tanggap Ancaman Narkoba dari 173 kab/kota sebesar 122 kab/kota (101,67%) yang terdiri dari 23 kab/kota berkategori sangat tanggap (13,29%) dan 99 kab/kota kategori tanggap (57,23%), Capaian Advokasi kebijakan KOTAN tahun 2023 sebanyak 414 lembaga (100%) dari target yang ditetapkan 414 lembaga yang tersebar di 4 lingkungan dengan rincian 147 lembaga di lingkungan pemerintah, 22 lembaga di lingkungan swasta, 153 lembaga di lingkungan Pendidikan dan 92 lembaga di lingkungan masyarakat.
- 2. Capaian IKP Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 dengan capaian tertinggi secara berurutan lingkungan pendidikan (3,51), lingkungan masyarakat (3,49), lingkungan pemerintah (3,49), dan lingkungan swasta (3,50) dengan prosentase (107,69%).
- 3. Keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba yang berjumlah 68 kawasan secara keseluruhan berhasil mengubah data jumlah Kawasan rawan narkoba tahun 2022, yang semula berjumlah 8002 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada menjadi 7435 di Tahun 2023 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada.
- 4. Capaian realisasi anggaran kedeputian pemberdayaan masyarakat sebesar 61.895.515.000,- atau sebesar 98,64%. Jika dibanding dengan T.A 2022 telah diserap sebesar Rp 58.977.426.966,- atau sebesar 98,64% maka terjadi penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 0,43%.

B. Rekomendasi

- 1. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah tentang P4GN sebagai payung hukum implementasi Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- 2. Menyusun rencana aksi daerah tentang P4GN yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan swasta melalui program CSR;
- 4. Mendorong partisipasi aktif dan peran Kementerian/Lembaga melalui implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN;

5. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam program Dayamas khususnya membangun kemitraan masyarakat antara lain PKK, Komunitas Pemuda dan komunitas masyarakat lainnya.

Jakarta, Januari 2024

Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. Heri Maryadi, M.M.





Gambar 01 Pemetaan Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Aceh Utara dan Mandailing Natal





Gambar 02 Bimtek Life Skill di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah





Gambar 03 Bimtek Life Skill di Batam, Kepri (foto atas) dan bimtek life skill pembuatan pupuk organik di Aceh Utara (foto bawah)





Gambar 04 Bimtek Life Skill di Cirebon, Jawa Barat (foto atas) dan bimtek *life skill* Barista di Kalimantan Timur (foto bawah)





Gambar 05 Tanam Perdana Komoditi Jagung GDAD seluas 70 ha di Kabupaten Bireuen (foto atas) dan pelaksanaan monev GDAD di Kab. Bireuen (foto bawah)





Gambar 06 Monev GDAD di Desa Kenyaran kec. Pantan Cuaca kab Gayo Lues Gayo Lues (foto atas) dan pelaksanaan monev Pemberdayaan Alternatif di Kelurahan Puwoyoso Jawa Tengah (foto bawah)





Gambar 07 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (foto atas) dan pelaksanaan Sosialisasi P4GN dalam mewujudkan KOTAN di Papua (foto bawah)





Gambar 08 Pemberdayaan Masyarakat dan Stakeholder melalui Test Urine





Gambar 09 Workshop dan Asistensi Kebijakan KOTAN





Gambar 10 Pembinaan Teknis bagi Satuan Kerja Pelaksana Program Pemberdayaan Alternatif

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN

Jakarta, 22 Desember 2023

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Hasil Pengukuran Indeks KOTAN

<u>Tahun 2023</u>

Kepada Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di tempat

1. Rujukan:

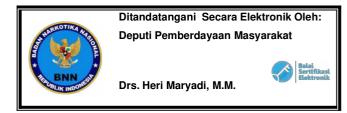
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2023.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.
- 3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kebupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

/4. Demikian ŭ .

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





<u>Tembusan:</u>

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

<u>LAMPIRAN</u> SURAT KEPALA BNNN

NOMOR: B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN

TANGGAL: 22 Desember 2023

HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA TAHUN 2023

				Variabel					Mutu
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aceh	1,88	3,05	2,72	2,70	2,82	2,60	Cukup Tanggap	С
2	Gayo Lues	1,81	3,53	2,99	3,54	3,70	3,07	Tanggap	В
3	Aceh Selatan	1,82	3,51	3,01	3,20	3,48	2,95	Tanggap	В
4	Pidie	1,73	2,93	2,47	2,69	2,91	2,52	Cukup Tanggap	С
5	Pidie Jaya	1,76	3,33	2,87	2,88	3,42	2,79	Tanggap	В
6	Aceh Tamiang	1,86	2,86	2,35	2,43	2,56	2,41	Cukup Tanggap	С
7	Bireuen	1,97	3,55	3,26	3,30	3,70	3,09	Tanggap	В
8	Kota Sabang	2,07	3,19	2,89	3,00	3,05	2,81	Tanggap	В
9	Kota Lhokseumawe	2,00	3,00	2,62	2,76	3,01	2,65	Tanggap	В
10	Kota Langsa	1,98	3,50	3,17	3,39	3,32	3,03	Tanggap	В
11	Banda Aceh	1,80	2,96	2,23	2,42	2,41	2,38	Cukup Tanggap	С
12	Sumatera Utara	2,23	3,42	3,02	3,33	3,30	3,04	Tanggap	В
13	Mandailing Natal	1,72	3,02	2,27	2,60	3,29	2,56	Cukup Tanggap	С
14	Deli Serdang	2,12	3,23	2,73	2,89	2,90	2,77	Tanggap	В
15	Simalungun	2,13	3,49	3,15	3,46	3,49	3,11	Tanggap	В
16	Serdang Bedagai	2,46	3,65	3,48	3,72	3,45	3,32	Sangat Tanggap	Α
17	Kota Pematang Siantar	2,68	3,67	3,30	3,78	3,10	3,33	Sangat Tanggap	Α
18	Kota Asahan	1,95	3,37	3,01	3,56	3,78	3,09	Tanggap	В
19	Kota Tebing Tinggi	2,43	3,31	2,76	2,83	3,10	2,88	Tanggap	В
20	Kota Tanjungbalai	2,57	3,53	3,00	3,33	3,40	3,17	Tanggap	В

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Tapanuli Selatan	1,90	3,39	2,88	3,44	3,05	2,93	Tanggap	В
22	Kota Binjai	2,08	3,11	2,93	3,16	3,24	2,87	Tanggap	В
23	Langkat	2,50	3,61	3,23	3,56	3,52	3,27	Sangat Tanggap	Α
24	Kota Gunung Sitoli	1,99	3,03	2,59	2,76	2,84	2,63	Cukup Tanggap	О
25	Labuhanbatu Utara	2,16	3,52	3,15	3,56	3,71	3,18	Tanggap	В
27	Karo	2,11	3,39	3,12	3,49	3,32	3,06	Tanggap	В
27	Batu Bara	2,52	3,72	3,51	3,64	3,36	3,33	Sangat Tanggap	Α
28	Sumatera Barat	2,19	3,34	3,02	3,26	3,31	3,00	Tanggap	В
29	Kota Payakumbuh	2,32	3,84	3,46	3,88	3,93	3,44	Sangat Tanggap	Α
30	Kota Sawahlunto	1,72	3,05	2,63	2,85	3,06	2,63	Cukup Tanggap	С
31	Pasaman Barat	2,93	3,36	3,31	3,51	3,30	3,27	Sangat Tanggap	Α
32	Solok	1,85	3,13	2,60	2,78	2,95	2,64	Cukup Tanggap	С
33	Sumatera Selatan	2,00	3,15	2,71	2,88	3,01	2,73	Tanggap	В
34	Kota Pagar Alam	1,86	3,02	2,47	2,46	2,87	2,51	Cukup Tanggap	С
35	Kota Lubuklinggau	1,79	3,10	2,74	2,88	3,05	2,68	Tanggap	В
36	Prabumulih	1,80	3,09	2,46	2,59	2,66	2,52	Cukup Tanggap	О
37	Ogan Ilir	1,78	3,20	2,55	2,95	3,20	2,72	Tanggap	В
38	Ogan Komering ilir	1,91	3,33	3,01	3,34	3,29	2,94	Tanggap	В
39	Empat Lawang	2,50	3,61	3,34	3,61	3,61	3,31	Sangat Tanggap	Α
40	Muara Enim	2,38	3,13	2,82	2,93	3,14	2,86	Tanggap	В
41	Musi Rawas	1,90	2,83	2,40	2,43	2,56	2,42	Cukup Tanggap	С
42	Ogan Komering Ulu Timur	2,06	3,11	2,80	2,98	3,05	2,78	Tanggap	В
43	Bengkulu	1,89	3,03	2,57	2,72	2,82	2,59	Cukup Tanggap	С
44	Bengkulu Selatan	2,03	3,24	2,88	3,06	3,01	2,82	Tanggap	В
45	Kota Bengkulu	1,78	2,84	2,32	2,42	2,64	2,39	Cukup Tanggap	С

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Jambi	2,06	3,27	2,83	3,05	3,10	2,84	Tanggap	В
47	Batang Hari	2,18	3,43	3,12	3,17	3,24	2,99	Tanggap	В
48	Tanjung Jabung Timur	1,86	2,98	2,60	2,76	2,91	2,60	Cukup Tanggap	С
49	Kota Jambi	2,13	3,30	2,65	3,16	3,04	2,87	Tanggap	В
50	Riau	2,01	3,33	3,00	3,34	3,38	2,97	Tanggap	В
51	Kota Dumai	2,04	3,57	3,56	3,65	3,72	3,23	Tanggap	В
52	Kota Pekanbaru	2,12	3,21	2,59	3,48	3,24	2,95	Tanggap	В
53	Pelalawan	1,95	3,47	3,10	3,52	3,65	3,09	Tanggap	В
54	Kuantan Sengingi	1,94	3,08	2,77	2,75	2,97	2,66	Tanggap	В
55	Kepulauan Riau	2,14	3,61	3,21	3,58	3,58	3,19	Tanggap	В
56	Karimun	2,35	3,71	3,42	3,72	3,72	3,35	Sangat Tanggap	Α
57	Kota Batam	2,17	3,56	3,40	3,66	3,72	3,25	Tanggap	В
58	Tanjung Pinang	1,96	3,55	2,85	3,37	3,31	3,00	Tanggap	В
59	Bangka Belitung	1,97	3,33	2,98	3,23	3,26	2,92	Tanggap	В
60	Bangka Selatan	1,78	2,99	2,60	2,73	3,01	2,59	Cukup Tanggap	О
61	Bangka	2,01	3,39	3,17	3,52	3,40	3,06	Tanggap	В
62	Kota Pangkalpinang	1,88	3,34	2,86	3,04	3,11	2,82	Tanggap	В
63	Belitung	2,18	3,51	3,08	3,39	3,35	3,08	Tanggap	В
64	Lampung	1,93	3,24	2,76	3,09	3,15	2,81	Tanggap	В
65	Tanggamus	1,89	3,26	2,78	3,05	2,89	2,76	Tanggap	В
66	Lampung selatan	2,17	3,77	3,33	3,78	3,82	3,34	Sangat Tanggap	Α
67	Kota Metro	1,92	3,15	2,63	2,75	3,02	2,67	Tanggap	В
68	Way Kanan	1,82	2,89	2,37	2,90	2,87	2,57	Cukup Tanggap	С
69	Lampung Timur	1,73	2,74	2,38	2,44	3,17	2,44	Cukup Tanggap	С
70	Banten	2,18	3,39	3,08	3,41	3,39	3,06	Tanggap	В

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Kota Tangerang Selatan	2,98	3,66	3,59	3,77	3,76	3,52	Sangat Tanggap	Α
72	Kota Cilegon	1,79	2,99	2,49	2,81	2,57	2,53	Cukup Tanggap	С
73	Kota Tangerang	1,99	3,57	3,20	3,71	3,74	3,20	Tanggap	В
74	DKI Jakarta	1,84	3,03	2,50	2,57	2,94	2,55	Cukup Tanggap	С
75	Kota Jakarta Timur	1,76	2,70	2,19	2,31	2,59	2,30	Cukup Tanggap	С
76	Kota Jakarta Selatan	1,90	3,03	2,55	2,55	2,89	2,56	Cukup Tanggap	С
77	Kota Jakarta Utara	1,74	3,25	2,63	2,80	3,23	2,70	Tanggap	В
78	Jawa Barat	1,97	3,34	2,80	3,14	3,23	2,88	Tanggap	В
79	Karawang	1,79	3,07	2,53	2,59	2,98	2,56	Cukup Tanggap	С
80	Sukabumi	1,82	3,30	2,84	3,05	3,08	2,79	Tanggap	В
81	Bogor	2,39	3,27	2,88	3,16	3,31	2,99	Tanggap	В
82	Sumedang	1,93	3,13	2,58	2,66	3,04	2,65	Cukup Tanggap	С
83	Tasikmalaya	2,00	3,38	2,76	3,24	3,30	2,92	Tanggap	В
84	Ciamis	1,73	3,02	2,29	2,46	2,65	2,43	Cukup Tanggap	С
85	Kuningan	1,95	3,33	2,66	3,02	2,96	2,78	Tanggap	В
86	Kota Cirebon	1,77	3,10	2,54	2,76	3,18	2,64	Cukup Tanggap	С
87	Kota Depok	1,91	3,59	3,00	3,73	3,72	3,17	Tanggap	В
88	Cianjur	1,60	3,40	2,95	3,44	3,14	2,87	Tanggap	В
89	Garut	2,32	3,52	3,15	3,82	3,63	3,27	Sangat Tanggap	А
90	Kota Bandung	2,13	3,44	2,75	3,14	3,41	2,96	Tanggap	В
91	Kota Cimahi	2,10	3,89	3,51	3,93	3,93	3,42	Sangat Tanggap	Α
92	Bandung Barat	1,95	2,90	2,23	2,42	2,57	2,43	Cukup Tanggap	С
93	DI Yogyakarta	2,03	3,20	2,57	2,92	2,80	2,71	Tanggap	В
94	Kota Yogyakarta	1,94	3,26	2,45	2,88	2,89	2,70	Tanggap	В

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	Bantul	1,95	3,14	2,55	2,78	2,73	2,63	Cukup Tanggap	С
96	Sleman	2,16	3,19	2,74	3,12	2,78	2,81	Tanggap	В
97	Jawa Tengah	2,11	3,49	3,14	3,55	3,40	3,11	Tanggap	В
98	Kendal	1,76	3,11	2,58	2,75	2,86	2,59	Cukup Tanggap	С
99	Temanggung	2,24	3,63	3,28	3,81	3,38	3,25	Sangat Tanggap	Α
100	Banyumas	2,20	3,53	3,33	3,72	3,61	3,23	Tanggap	В
101	Purbalingga	2,21	3,41	3,16	3,66	3,37	3,14	Tanggap	В
102	Batang	2,26	3,52	3,19	3,86	3,36	3,24	Tanggap	В
103	Cilacap	2,32	3,59	3,25	3,79	3,46	3,27	Sangat Tanggap	Α
104	Magelang	2,12	3,90	3,59	3,90	3,97	3,43	Sangat Tanggap	Α
105	Kota Surakarta	1,81	3,28	2,68	2,97	3,02	2,74	Tanggap	В
106	Kota Tegal	2,13	3,51	3,25	3,70	3,77	3,23	Tanggap	В
107	Jawa Timur	2,06	3,57	3,12	3,47	3,42	3,10	Tanggap	В
108	Malang	2,31	3,74	3,23	3,58	3,49	3,25	Sangat Tanggap	Α
109	Tulungagung	1,97	3,53	3,07	3,47	3,50	3,07	Tanggap	В
110	Pasuruan	2,10	3,67	3,25	3,64	3,53	3,21	Tanggap	В
111	Sumenep	1,96	3,67	3,50	3,85	3,90	3,31	Sangat Tanggap	Α
112	Gresik	2,03	3,51	3,10	3,40	3,41	3,06	Tanggap	В
113	Lumajang	2,15	3,40	2,93	3,11	3,38	2,96	Tanggap	В
114	Kediri	1,84	3,32	2,68	3,16	2,77	2,76	Tanggap	В
115	Tuban	2,08	3,47	3,01	3,38	3,54	3,06	Tanggap	В
116	Kota Malang	1,84	3,30	2,87	3,10	3,14	2,82	Tanggap	В
117	Kota Surabaya	2,17	3,42	2,97	3,25	3,14	2,98	Tanggap	В
118	Kota Kediri	2,14	3,79	3,38	3,72	3,73	3,31	Sangat Tanggap	Α
119	Sidoarjo	2,00	3,63	3,02	3,62	3,68	3,17	Tanggap	В
120	Kota Batu	2,14	3,41	2,88	3,13	2,71	2,87	Tanggap	В

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	Trenggalek	2,14	3,71	3,17	3,67	3,67	3,25	Tanggap	В
122	Nganjuk	2,16	3,70	3,24	3,63	3,62	3,24	Tanggap	В
123	Kota Mojokerto	2,02	3,56	3,18	3,52	3,25	3,08	Tanggap	В
124	Blitar	2,05	3,77	3,49	3,72	3,62	3,28	Sangat Tanggap	Α
125	Bali	1,98	3,30	2,75	3,01	3,14	2,82	Tanggap	В
126	Badung	2,04	3,36	2,82	3,17	3,11	2,89	Tanggap	В
127	Gianyar	2,00	3,35	2,73	3,09	3,48	2,91	Tanggap	В
128	Klungkung	1,72	2,72	2,20	2,44	2,61	2,33	Cukup Tanggap	С
129	Buleleng	2,20	3,55	3,02	3,13	3,23	3,01	Tanggap	В
130	Karangasem	1,95	3,13	2,43	2,82	2,90	2,65	Tanggap	В
131	Kota Denpasar	1,94	3,35	2,93	3,28	3,30	2,93	Tanggap	В
132	NTT	2,09	2,98	2,47	2,58	2,54	2,54	Cukup Tanggap	С
133	Kota Kupang	2,13	2,85	2,34	2,41	2,49	2,45	Cukup Tanggap	С
134	Belu	2,18	3,09	2,85	2,86	2,70	2,72	Tanggap	В
135	Rote Ndao	1,97	3,02	2,38	2,57	2,50	2,50	Cukup Tanggap	С
136	NTB	2,02	3,25	2,71	2,88	3,00	2,76	Tanggap	В
137	Sumbawa Barat	1,90	2,96	2,59	2,61	2,96	2,57	Cukup Tanggap	С
138	Bima	2,11	3,11	2,50	2,53	2,73	2,60	Cukup Tanggap	С
139	Mataram	2,31	3,87	3,14	3,80	3,31	3,30	Sangat Tanggap	Α
140	Sumbawa	1,85	3,15	2,68	2,78	3,11	2,68	Tanggap	В
141	Kalimantan Selatan	1,98	3,40	2,99	3,25	3,28	2,95	Tanggap	В
142	Barito Kuala	1,94	3,88	3,47	3,89	3,75	3,33	Sangat Tanggap	Α
143	Kota Banjarbaru	2,11	3,40	3,02	3,28	2,91	2,94	Tanggap	В
144	Balangan	1,94	3,35	2,95	3,30	3,52	2,97	Tanggap	В
145	Tanah Laut	2,13	3,37	3,08	3,30	3,47	3,03	Tanggap	В

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Tabalong	1,75	3,29	2,86	2,95	3,35	2,79	Tanggap	В
147	Hulu Sungai Selatan	1,76	3,09	2,64	2,79	2,86	2,60	Cukup Tanggap	С
148	Hulu Sungai Utara	2,10	3,72	3,12	3,71	3,68	3,24	Tanggap	В
149	Kota Banjarmasin	2,13	3,31	2,90	3,04	3,36	2,91	Tanggap	В
150	Kalimantan Barat	2,02	3,20	2,73	2,96	3,06	2,78	Tanggap	В
151	Bengkayang	1,73	3,16	2,51	2,91	2,89	2,63	Cukup Tanggap	С
152	Kubu Raya	1,99	3,41	3,09	3,41	3,50	3,03	Tanggap	В
153	Sintang	2,25	3,43	3,03	3,18	3,39	3,03	Tanggap	В
154	Sanggau	2,10	3,08	2,51	2,52	2,95	2,62	Cukup Tanggap	С
155	Kota Singkawang	1,98	2,83	2,58	2,53	2,62	2,49	Cukup Tanggap	С
156	Kota Pontianak	2,01	3,13	2,52	2,84	2,82	2,67	Tanggap	В
157	Mempawah	2,10	3,51	3,01	3,52	3,48	3,11	Tanggap	В
158	Kalimantan Timur	2,37	3,44	2,92	3,27	3,51	3,09	Tanggap	В
159	Samarinda	1,99	3,30	2,53	3,05	3,41	2,85	Tanggap	В
160	Balikpapan	2,02	3,44	2,94	3,22	3,56	3,00	Tanggap	В
161	Bontang	2,90	3,55	3,24	3,49	3,57	3,34	Sangat Tanggap	Α
162	Kalimantan Tengah	2,40	3,59	3,23	3,45	3,58	3,22	Tanggap	В
163	Kotawaringin Barat	2,51	3,91	3,82	3,98	3,98	3,58	Sangat Tanggap	Α
164	Kota Palangka Raya	2,31	3,35	2,84	3,06	3,29	2,96	Tanggap	В
165	Kalimantan Utara	1,75	3,03	2,79	2,78	3,02	2,62	Cukup Tanggap	С
166	Kota Tarakan	1,73	3,07	2,81	3,00	3,10	2,70	Tanggap	В
167	Nunukan	1,78	2,99	2,76	2,52	2,95	2,54	Cukup Tanggap	С
168	Sulawesi Selatan	1,94	3,35	3,00	3,26	3,23	2,92	Tanggap	В
169	Tana Toraja	2,26	3,55	3,03	3,30	3,27	3,07	Tanggap	В

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	Bone	1,81	3,26	3,09	3,21	3,39	2,89	Tanggap	В
171	Kota Palopo	1,83	3,30	2,81	3,32	2,86	2,82	Tanggap	В
172	Sulawesi Tengah	1,89	3,04	2,64	2,68	2,86	2,59	Cukup Tanggap	С
173	Banggai Kepulauan	1,86	3,16	2,70	2,83	2,92	2,67	Tanggap	В
174	Poso	1,82	2,86	2,56	2,45	2,59	2,43	Cukup Tanggap	С
175	Tojo Una-Una	1,88	3,04	2,62	2,62	2,63	2,54	Cukup Tanggap	С
176	Kota Palu	1,81	2,87	2,50	2,62	2,94	2,52	Cukup Tanggap	С
177	Morowali	1,95	3,33	3,07	3,06	3,34	2,89	Tanggap	В
178	Donggala	2,02	3,06	2,50	2,58	2,88	2,60	Cukup Tanggap	С
179	Sulawesi Tenggara	2,04	3,10	2,61	2,82	3,02	2,70	Tanggap	В
180	Muna	1,96	2,98	2,47	2,61	2,99	2,58	Cukup Tanggap	С
181	Kolaka	2,13	3,09	2,55	2,66	2,81	2,65	Cukup Tanggap	С
182	Kota Kendari	2,03	2,89	2,36	2,43	2,84	2,50	Cukup Tanggap	С
183	Kota Bau-Bau	2,06	3,44	3,01	3,51	3,38	3,06	Tanggap	В
184	Gorontalo	2,04	3,29	2,71	3,04	3,06	2,82	Tanggap	В
185	Boalemo	2,07	3,24	2,94	2,98	3,13	2,84	Tanggap	В
186	Bone Bolango	1,78	2,95	2,39	2,58	2,92	2,50	Cukup Tanggap	С
187	Kota Gorontalo	2,06	3,10	2,56	2,75	2,81	2,66	Tanggap	В
188	Gorontalo Utara	2,24	3,72	2,93	3,72	3,46	3,23	Tanggap	В
189	Gorontalo	1,85	3,08	2,57	2,66	2,70	2,56	Cukup Tanggap	С
190	Maluku	2,12	2,95	2,59	2,87	2,82	2,67	Tanggap	В
191	Buru Selatan	2,26	3,29	2,88	3,46	3,02	3,00	Tanggap	В
192	Kota Tual	2,01	2,65	2,34	2,36	2,63	2,38	Cukup Tanggap	С
193	Maluku Utara	1,99	2,93	2,60	2,66	2,64	2,55	Cukup Tanggap	С
194	Pulau Morotai	2,00	3,00	2,58	2,62	2,65	2,56	Cukup Tanggap	С
195	Halmahera Utara	2,16	2,91	2,70	2,84	2,93	2,69	Tanggap	В

				Variabel					
No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Ketahana n Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayaha n	Kelembagaan	Hukum	Indeks	Kategori	Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Kota Tidore Kepualauan	1,85	2,91	2,51	2,56	2,47	2,45	Cukup Tanggap	С
197	Papua	2,24	3,00	2,84	2,77	3,17	2,76	Tanggap	В
198	Jayapura	2,19	2,77	2,69	2,45	3,12	2,59	Cukup Tanggap	С
199	Mimika	2,27	3,22	2,98	3,06	3,21	2,92	Tanggap	В
200	Sulawesi Barat	1,87	3,23	2,88	2,86	3,09	2,74	Tanggap	В
201	Poliwali Mandar	1,87	3,23	2,88	2,86	3,09	2,74	Tanggap	В
202	Sulawesi Utara	1,93	3,16	2,68	2,84	2,82	2,67	Tanggap	В
203	Kepulauan Sangihe	1,88	3,70	3,29	3,56	2,97	3,06	Tanggap	В
204	Bolaang Mongondow	1,89	2,99	2,56	2,66	2,88	2,57	Cukup Tanggap	С
205	Kota Bitung	1,97	2,90	2,40	2,62	2,72	2,52	Cukup Tanggap	С
206	Kota Manado	1,99	3,04	2,46	2,59	2,71	2,56	Cukup Tanggap	С
207	Papua Barat	2,00	3,00	2,71	2,77	3,04	2,67	Tanggap	В
	Rata-Rata Nasional	2,03	3,27	2,85	3,07	3,12	2,85	Tanggap	В





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Drs. Heri Maryadi, M.M.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor

: B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

Jakarta, 15 Januari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : F

: Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian

Partisipasi (IKP) Tahun 2023

Kepada Yth.

1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan:

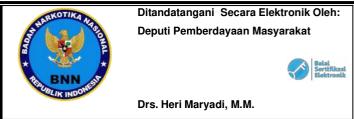
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasidan
 Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
 Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2023.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2023 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.
- 3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari tiap BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian ů .

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL: 15 Januari 2024

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2023

NO	CATKED		НА	SIL IKP		INDEKC	KATECODI	MUTU
NO	SATKER	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDEKS	KATEGORI	MUTU
1	BNNP Aceh	3.25			3.27	3.26	Sangat Mandiri	Α
2	BNNK Sabang	3.71			3.8	3.755	Sangat Mandiri	Α
3	BNNK Pidie Jaya	3.34		3.72		3.53	Sangat Mandiri	Α
4	BNNK Pidie	2.88		3.2		3.04	Mandiri	В
5	BNNK Gayo Lues			2.86	3.18	3.02	Mandiri	В
6	BNNK Bireuen	3.51			3.5	3.505	Sangat Mandiri	Α
7	BNNK Banda Aceh	3.48			3.62	3.55	Sangat Mandiri	Α
8	BNNK Aceh Tamiang	3.48			3.43	3.455	Sangat Mandiri	Α
9	BNNK Aceh Selatan	3.33		3.28		3.305	Sangat Mandiri	Α
10	BNN Kota Lhokseumawe	3.84			3	3.42	Sangat Mandiri	Α
11	BNN Kota Langsa	3.53		3.4		3.465	Sangat Mandiri	Α
12	BNNP Sumatera Barat	3.61			3.53	3.57	Sangat Mandiri	Α
13	BNNK Solok			3.58	3.97	3.775	Sangat Mandiri	Α
14	BNNK Sawahlunto	3.74		-	3.33	3.535	Sangat Mandiri	Α
15	BNNK Payakumbuh	3.83		3.87		3.85	Sangat Mandiri	Α
16	BNNK Pasaman Barat	3.68		3.46		3.57	Sangat Mandiri	Α
17	BNNP Sumatera Utara	3.36	3.53	-	-	3.45	Sangat Mandiri	Α

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	SATKER		НА	SIL IKP	, <u>=</u> , , ,	INDEKS	KATEGORI	MUTU
NO	SAIREN	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDLKS	RATEGORI	
18	BNNK Tb Tinggi	-	3.37	-	3.42	3.40	Sangat Mandiri	Α
19	BNNK Tapanuli Selatan	3.768			3.6432	3.71	Sangat Mandiri	Α
20	BNNK TJ. Balai			3.36	3.68	3.52	Sangat Mandiri	Α
21	BNNK Simalungun	3.47	3.33			3.40	Sangat Mandiri	Α
22	BNNK Serdang Bedagai	3.27	-	-	3.3	3.29	Sangat Mandiri	Α
23	BNNK Pematang Siantar	3.4	3.414			3.41	Sangat Mandiri	Α
24	BNNK Mandailing Natal	-	3.75	-	3.55	3.65	Sangat Mandiri	Α
25	BNNK Langkat	3.28	3.33			3.31	Sangat Mandiri	Α
26	BNNK Labuhan Batu Utara	3.2512		3.7456		3.50	Sangat Mandiri	Α
27	BNNK Karo	3.57			3.45	3.51	Sangat Mandiri	Α
28	BNNK Gunungsitoli	3.52	-	-	3.44	3.48	Sangat Mandiri	Α
29	BNNK Deli Serdang	3.76			3.68	3.72	Sangat Mandiri	Α
30	BNNK Binjai	3.65	-	-	3.51	3.58	Sangat Mandiri	Α
31	BNNK Batubara	3.72	-	-	3.48	3.6	Sangat Mandiri	Α
32	BNNK Asahan	3.44			3.44	3.44	Sangat Mandiri	Α
33	BNNP Sumatera Selatan	3.87			3.83	3.85	Sangat Mandiri	Α
34	BNNK Prabumulih	3.74			4	3.87	Sangat Mandiri	Α
35	BNNK Pagar Alam	3.52			3.52	3.52	Sangat Mandiri	Α
36	BNNK Oku Timur	3.5			3.64	3.57	Sangat Mandiri	Α

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL	· 15 Januari 2024	

NO	SATKER	HASIL IKP					KATEGORI	MUTU
NO	SAINER	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDEKS	INDERS KATEGORI	MUTU
37	BNNK Ogan Komering Ilir	3.75			3.82	3.785	Sangat Mandiri	Α
38	BNNK Ogan Ilir	3.42			3.4	3.41	Sangat Mandiri	Α
39	BNNK Muara Enim	3.6			3.63	3.615	Sangat Mandiri	Α
40	BNNK Lubuklinggau			3.72	3.86	3.79	Sangat Mandiri	Α
41	BNNK Empat Lawang	3.51			3.36	3.435	Sangat Mandiri	Α
42	BNN Kab Musi Rawas		3.41	3.46		3.435	Sangat Mandiri	Α
43	BNNP Lampung	3.32		3.68		3.5	Sangat Mandiri	Α
44	BNNK Way Kanan	3.60			3.48	3.54	Sangat Mandiri	Α
45	BNNK Tanggamus	3.68			3.68	3.68	Sangat Mandiri	Α
46	BNNK Lampung Timur			3.56	3.64	3.6	Sangat Mandiri	Α
47	BNNK Lampung Selatan	3.64			3.52	3.58	Sangat Mandiri	Α
48	BNN Kota Metro	3.62		3.53		3.575	Sangat Mandiri	Α
49	BNNP RIAU	3.74			3.62	3.68	Sangat Mandiri	Α
50	BNNK Pelalawan	3.42			3.5	3.46	Sangat Mandiri	Α
51	BNNK Pekan Baru	3.8	3.9	-	-	3.85	Sangat Mandiri	Α
52	BNNK Kuantan Singingi			3.72	3.78	3.75	Sangat Mandiri	Α
53	BNN Kota Dumai	3.85	-	-	3.92	3.885	Sangat Mandiri	Α
54	BNNP Kepulauan Riau		4		4	4	Sangat Mandiri	Α
55	BNNK Tanjungpinang	3.52			3.57	3.5456	Sangat Mandiri	Α

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	SATKER		НА	SIL IKP		INDEKS	KATEGORI	MUTU
140	JATREIT	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDLING	KATEGOTII	WOTO
56	BNNK Karimun			4	4	4	Sangat Mandiri	Α
57	BNN Kota Batam			3.93	3.78	3.855	Sangat Mandiri	Α
58	BNNP Jambi	3.612	-	-	3.644	3.628	Sangat Mandiri	Α
59	BNNK Tanjab Timur	-	3.296	2.912	-	3.104	Mandiri	В
60	BNN Kota Jambi	-	3.86	-	3.924	3.892	Sangat Mandiri	Α
61	BNNK Batanghari	3.59			3.57	3.58	Sangat Mandiri	Α
62	BNNP Bangka Belitung	3.28			3.34	3.31	Sangat Mandiri	Α
63	BNNK Pangkalpinang			3.6	3.1	3.35	Sangat Mandiri	Α
64	BNNK Belitung	3.6		-	3.5	3.55	Sangat Mandiri	Α
65	BNNK Bangka selatan	3			3.4	3.2	Mandiri	В
66	BNNK Bangka			3.59	3.63	3.61	Sangat Mandiri	Α
67	BNNP Bengkulu	3.51	-	-	3.73	3.62	Sangat Mandiri	Α
68	BNNK Bengkulu Selatan	3.46		3.8		3.63	Sangat Mandiri	Α
69	BNNK Bengkulu	3.45		3.33		3.39	Sangat Mandiri	Α
70	BNNP DKI Jakarta	3.33	3.21	-	-	3.27	Sangat Mandiri	Α
71	BNNK Jakarta Selatan	3.31			3.12	3.215	Mandiri	В
72	BNN Kota Jakarta Utara		3.57		3.73	3.65	Sangat Mandiri	Α
73	BNN Kota Jakarta Timur	2.81				2.81	Mandiri	В
74	BNNP Banten	3.54		3.72		3.63	Sangat Mandiri	Α

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL 15 Januari 2024

NO	SATKER		НА	SIL IKP		INDEKS	KATEGORI	MUTU
110	OATREIT	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDERO	KATEGOTII	IIIO I O
75	BNNK Kota Tangerang Selatan			3.27	3.28	3.275	Sangat Mandiri	Α
76	BNNK Kota Tangerang			3.25	3.25	3.25	Mandiri	В
77	BNNK Kota Cilegon		3.52		3.77	3.645	Sangat Mandiri	Α
78	BNNP Jawa Barat	3.43	-	-	3.49	3.46	Sangat Mandiri	Α
79	BNNK Sumedang	3.52			3.21	3.365	Sangat Mandiri	Α
80	BNNK Sukabumi	3.83			3.81	3.82	Sangat Mandiri	Α
81	BNNK Karawang	3.88	3.75			3.815	Sangat Mandiri	Α
82	BNNK Garut		3.6		3.64	3.62	Sangat Mandiri	Α
83	BNNK Cimahi			3.64	3.44	3.54	Sangat Mandiri	Α
84	BNNK Cianjur	3.21			3.2	3.21	Mandiri	В
85	BNNK Ciamis	3.6			3.52	3.56	Sangat Mandiri	Α
86	BNNK Bandung Barat			3.52	4.0	3.76	Sangat Mandiri	Α
87	BNN Kota Tasikmalaya	3.43	3.48			3.455	Sangat Mandiri	Α
88	BNN Kota Depok	3.6			3.39	3.50	Sangat Mandiri	Α
89	BNN Kota Cirebon	2.56		2.64		2.6	Mandiri	В
90	BNN Kota Bandung		3.34		3.78	3.56	Sangat Mandiri	Α
91	BNN Kabupaten Bogor			3.74	3.12	3.43	Sangat Mandiri	Α
92	BNNK Kuningan	3.57			3.43	3.5	Sangat Mandiri	Α
93	BNNP Jawa Tengah	3.52		3.44		3.48	Sangat Mandiri	Α

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL: 15 Januari 2024

NO	SATKER		НА	SIL IKP	IAMI	INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
94	BNNK Temanggung			3.64	3.66	3.65	Sangat Mandiri	Α
95	BNNK Tegal		3.28		3.3	3.29	Sangat Mandiri	Α
96	BNNK Purbalingga	3.39			3.38	3.385	Sangat Mandiri	Α
97	BNNK Magelang			3.52	3.48	3.5	Sangat Mandiri	Α
98	BNNK Cilacap	3.49			3.36	3.425	Sangat Mandiri	Α
99	BNNK Batang	3.32			3.32	3.32	Sangat Mandiri	Α
100	BNNK Banyumas	3.52		3.64		3.58	Sangat Mandiri	Α
101	BNN Kota Surakarta	3.37			3.47	3.42	Sangat Mandiri	Α
102	BNN Kab Kendal	3.83			3.67	3.75	Sangat Mandiri	Α
103	BNNP Jawa Timur	3.65			3.68	3.665	Sangat Mandiri	Α
104	BNNK Tulung Agung	3.92		3.8		3.86	Sangat Mandiri	Α
105	BNNK Tuban			3.6	3.47	3.535	Sangat Mandiri	Α
106	BNNK Trenggalek	3.5			3.4	3.45	Sangat Mandiri	Α
107	BNNK Sumenep	3.24			3.36	3.3	Sangat Mandiri	Α
108	BNNK Sidoarjo	3.66		3.96		3.81	Sangat Mandiri	Α
109	BNNK Pasuruan			3.69	3.78	3.735	Sangat Mandiri	Α
110	BNNK Nganjuk			3.79	3.54	3.665	Sangat Mandiri	Α
111	BNNK Mojokerto	3.26		3.36		3.31	Sangat Mandiri	Α
112	BNN Kab Malang	3.69		3.71		3.7	Sangat Mandiri	Α
113	BNNK Lumajang	3.04			3.56	3.3	Sangat Mandiri	Α
114	BNNKab Kediri	3.3	_	3.34		3.32	Sangat Mandiri	Α
115	BNNK Gresik	4			3.88	3.94	Sangat Mandiri	Α
116	BNNK Blitar	3.36			3.32	3.34	Sangat Mandiri	Α

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL : 15 Januari 2024

NO	SATKER		НА	SIL IKP	· Aut. ii	INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
117	BNN Kota Surabaya	3.28			3.27	3.275	Sangat Mandiri	Α
118	BNN Kota Malang			3.39	3.42	3.405	Sangat Mandiri	Α
119	BNN Kota Kediri	3.88		3.72		3.8	Sangat Mandiri	Α
120	BNN Kota Batu	3.6			3.48	3.54	Sangat Mandiri	Α
121	BNNP D.I. Yogyakarta			3.6	3.44	3.52	Sangat Mandiri	Α
122	BNNK Sleman			3.51	3.45	3.48	Sangat Mandiri	Α
123	BNNK Bantul			3.35	3.47	3.41	Sangat Mandiri	Α
124	BNN Kota Yogyakarta			3.37	3.43	3.4	Sangat Mandiri	Α
125	BNNP Bali	3.85		3.64		3.745	Sangat Mandiri	Α
126	BNNK Klungkung			3.69	3.72	3.705	Sangat Mandiri	Α
127	BNNK Karangasem	3.2		3.4		3.3	Sangat Mandiri	Α
128	BNNK Gianyar	3.68	3			3.34	Sangat Mandiri	Α
129	BNN Kota Denpasar	3.2			3.2	3.2	Mandiri	В
130	BNN Kabupaten Badung			3.87	3.65	3.76	Sangat Mandiri	А
131	BNN Kab Buleleng	3.33			3.36	3.345	Sangat Mandiri	Α
132	BNNP NTB	3.36		3.25		3.305	Sangat Mandiri	Α
133	BNNK Sumbawa Barat	3.25			3.25	3.25	Mandiri	В
134	BNNK Sumbawa	3.66			3.32	3.49	Sangat Mandiri	Α
135	BNNK Mataram	3.76			3.68	3.72	Sangat Mandiri	Α
136	BNNK Bima	3.32		3.3		3.31	Sangat Mandiri	Α

NO	CATKED		НА	SIL IKP		INDEKO	KATEOODI	NALITI I
NO	SATKER	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDEKS	KATEGORI	MUTU
137	BNNP NTT			3.42	3.44	3.43	Sangat Mandiri	Α
138	BNNK Kota Kupang	3.40			3.66	3.53	Sangat Mandiri	Α
139	BNNK Belu			3.4	3.56	3.48	Sangat Mandiri	Α
140	BNN Kab. Rote Ndao			3.4	3.27	3.34	Sangat Mandiri	Α
141	BNNP Kalimantan Barat		3.48	3.3		3.39	Sangat Mandiri	Α
142	BNNK Sintang			3.08	3.69	3.385	Sangat Mandiri	Α
143	BNNK Sanggau	3.92			3.98	3.95	Sangat Mandiri	Α
144	BNNK Pontianak	3.58			3.86	3.72	Sangat Mandiri	Α
145	BNNK Mempawah			3.37	3.32	3.35	Sangat Mandiri	Α
146	BNN Kota Singkawang	3.56			3.55	3.555	Sangat Mandiri	Α
147	BNN Kab. Kubu Raya			3.48	3.51	3.495	Sangat Mandiri	Α
148	BNN Kab Bengkayang	3.18			3.57	3.375	Sangat Mandiri	Α
149	BNNP Kalimantan Selatan	3.56		3.02		3.29	Sangat Mandiri	Α
150	BNNK Tanah Laut			3.42	3.38	3.4	Sangat Mandiri	Α
151	BNNK Tabalong			3.38	3.33	3.36	Sangat Mandiri	Α
152	BNNK Hulu Sungai Utara	3.28		3.29		3.29	Sangat Mandiri	Α
153	BNNK Hulu sungai Selatan			3.66	3.62	3.64	Sangat Mandiri	Α
154	BNNK Barito Kuala	3.84		3.84		3.84	Sangat Mandiri	Α
155	BNNK Banjarmasin	3.72			3.42	3.57	Sangat Mandiri	Α
156	BNNK Banjarbaru			3.44	3.92	3.68	Sangat Mandiri	Α

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
110	JATREM	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDLING	KATEGOTII	MOTO
157	BNNK Balangan			3.33	3.35	3.34	Sangat Mandiri	Α
158	BNNP Kalimantan Tengah	3.76			3.64	3.7	Sangat Mandiri	Α
159	BNNK Palangka Raya	3.44			3.44	3.44	Sangat Mandiri	Α
160	BNNK Kotawaringin Barat	4			3.96	3.98	Sangat Mandiri	Α
161	BNNP Kalimantan Timur	3.52		3.6		3.56	Sangat Mandiri	Α
162	BNNK Samarinda	3.9		3.75		3.825	Sangat Mandiri	Α
163	BNNK Balikpapan		3.59	3.52		3.555	Sangat Mandiri	Α
164	BNN Kota Bontang			3.736	3.57	3.653	Sangat Mandiri	Α
165	BNNP Kalimantan Utara			3.63		3.63	Sangat Mandiri	Α
166	BNNK Tarakan	3.29			3.3	3.295	Sangat Mandiri	Α
167	BNNK Nunukan	3.27			3.29	3.28	Sangat Mandiri	Α
168	BNNP Sulawesi Barat			3.21	3.29	3.25	Mandiri	В
169	BNNK Polewali Mandar	3.38			3.8	3.59	Sangat Mandiri	Α
170	BNNP Sulawesi Tenggara	3.22			3.34	3.28	Sangat Mandiri	Α
171	BNNK Kolaka	4			3.5	3.75	Sangat Mandiri	Α
172	BNNK Bau Bau	3.89			3.73	3.81	Sangat Mandiri	Α
173	BNN Kota Kendari			3.42	3.53	3.475	Sangat Mandiri	Α
174	BNNK Muna	3.78			3.67	3.725	Sangat Mandiri	Α

NO	SATKER		НА		INDEKS	KATEGORI	MUTU	
110	OATREIT	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDLING	KATEGOTII	MOTO
175	BNNP Sulawesi Selatan	3.27		3.19		3.23	Mandiri	В
176	BNN Kota Palopo	3.42			3.81	3.615	Sangat Mandiri	Α
177	BNNK Tana Toraja			3.87	3.91	3.89	Sangat Mandiri	Α
178	BNNK Bone	3.5		3		3.25	Mandiri	В
179	BNNP Sulawesi Tengah	3.21		3.32		3.265	Sangat Mandiri	А
180	BNŇK Palu	3.28			3.53	3.405	Sangat Mandiri	Α
181	BNNK Donggala	3.35			3.69	3.52	Sangat Mandiri	Α
182	BNNK Banggai Kep	3.34			3.92	3.63	Sangat Mandiri	Α
183	BNN Kab. Tojo Una- Una	3.38			3.40	3.390	Sangat Mandiri	Α
184	BNN Kab Poso	3.48			3.64	3.56	Sangat Mandiri	Α
185	BNN Kab. Morowali	3.88			3.2	3.54	Sangat Mandiri	Α
186	BNNP Sulawesi Utara	2.83			3.64	3.235	Mandiri	В
187	BNNK Bolaang Mongondow			3.04	2.54	2.79	Mandiri	В
188	BNN Kota Bitung	3.35			3.21	3.28	Sangat Mandiri	Α
189	BNN Kota Manado	3.17			3.16	3.165	Mandiri	В
190	BNNK Kepulauan Sangihe	3.4			3.4	3.4	Sangat Mandiri	Α
191	BNNP Gorontalo	3.32			3.29	3.305	Sangat Mandiri	Α
192	BNN Kota Gorontalo	3.27			3.5	3.385	Sangat Mandiri	Α
193	BNNK Bone Bolango		3.74		3.45	3.595	Sangat Mandiri	Α

NO	SATKER		НА	SIL IKP		INDEKS KATEGORI		MUTU
NO	SAINER	PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	INDEKS	KATEGORI	MUTU
194	BNN Kab Gorontalo	3.72		3.34		3.53	Sangat Mandiri	Α
195	BNNK Gorontalo Utara	3.46		3.63		3.55	Sangat Mandiri	Α
196	BNNK Boalemo			3.08	3.32	3.2	Mandiri	В
197	BNNP Maluku			3.57	3.6	3.585	Sangat Mandiri	Α
198	BNNK Tual	3.8			3.2	3.5	Sangat Mandiri	Α
199	BNNK Buru Selatan		3.24	3.84		3.54	Sangat Mandiri	Α
200	BNNP Maluku Utara	3.62		3.44		3.53	Sangat Mandiri	Α
201	BNNK Pulau Morotai	3.2		3.68		3.44	Sangat Mandiri	Α
202	BNNK Halmahera Utara	3.2			3.12	3.16	Mandiri	В
203	BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32		3.28		3.3	Sangat Mandiri	Α
204	BNNP Papua	3.19			3.23	3.21	Mandiri	В
205	BNNK Mimika	3.23			3.23	3.23	Mandiri	В
206	BNNK Jayapura	3.14			3.29	3.22	Mandiri	В
207	BNNP Papua Barat	3.5			3.17	3.335	Sangat Mandiri	Α
Nilai	akhir IKP Tahun 2023	3.49	3.5	3.49	3.51	3.5	Sangat Mandiri	Α

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





